

Membaca Gejala “Mediatisasi” Politik di Indonesia

Noveri Faikar Urfan

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Abstract

Mediatization is considered as a process oriented of high modernity in which the media become an independent institution with logic of its own that other social institution accommodate to, especially politics. In the past, the media were the subordinate of politics, because the process of communication is centralized by political institution, in particular by political party, so the media were dominated by political logic. But now, after taking a large proliferation, media become omnipresent, so the logic of the media is widespread to any other social institutions. In some degree, politics have to accommodate the media logic. The logic of the media refers to the function of media as the “medium”, and constructing symbolic resource.

Keywords: *mediatization, mediatization as the process oriented, media logic, mediatization in Indonesia.*

Abstrak

Mediatisasi dipandang sebagai sebuah proses orientasi dari modernitas, saat media menjadi lembaga independent dengan logikanya sendiri. Lembaga sosial lainnya – terutama politik – harus mengikuti logika tersebut. Di masa lalu, media merupakan subordinat dari politik, karena proses komunikasi dilakukan secara terpusat oleh institusi politik, secara khususnya partai politik. Karenanya, media mejadi didominasi oleh logika politik. Namun sekarang, setelah melakukan perubahan besar-besaran, media menjadi semakin meluas dan logika media kini tersebar hingga ke lembaga sosial lain. Pada titik yang sama, politik harus mengakomodasi logika media. Logika media sendiri merujuk pada fungsi media sebagai “medium”, dan mengkonstruksi sumber daya simbolis.

Kata Kunci: *mediatisasi, mediatisasi sebagai proses, logika media, mediatisasi di Indonesia*

Pendahuluan

Pasca lengsernya Soeharto dan bergulirnya reformasi, dunia politik menjadi semacam perayaan. Salah satu parameternya dibuktikan dengan banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemilu. Jika dulu kita hanya mengenal tiga kandidat tetap partai peserta pemilu, pasca reformasi kita

berhadapan dengan 24 partai di pemilu 2004, dan 38 partai pada 2009, jumlah yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tidak seperti masa Orde Baru (Orba), ketika persoalan politik sangat sensitif untuk diperdebatkan, kini politik tidak lagi “tabu” untuk diributkan, bahkan terkesan *buka-bukaan*.